

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk**

Penerapan prinsip akuntabilitas atau prinsip pertanggungjawaban merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada setiap lembaga baik pertanggungjawaban terhadap perilaku ataupun terhadap suatu pekerjaan khususnya pada laporan keuangan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan juga sangat penting karena laporan keuangan merupakan hal yang menjadi patokan berbagai pihak untuk membuat suatu keputusan.<sup>1</sup>

Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Dapat dilihat dari buku laporan pertanggungjawaban yang dibuat pada setiap akhir periode di akhir tahun. Akan tetapi juga ada kekurangan dari penerapan tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya ditingkat nasional tapi juga lokal. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini sebenarnya tidak berjalan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan pengelola dan anggota Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk pada tanggal 30 Oktober 2020

sendiri, namun dihubungkan juga dengan prinsip yang lain seperti prinsip transparansi, efektifitas dan efisiensi dan partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertujuan untuk mengetahui bahwa seberapa jauh pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena lembaga institusi pemerintahan sangat penting sekali untuk memunculkan kehadiran masyarakat. Kenyataan ini menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melindungi bahkan menjamin hak individu warga negara secara ekonomi, sosio budaya dan politik.<sup>3</sup>

Adapun penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan yang diterapkan di Bumdesma sejahtera mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk sesuai dengan teori yang ada di dalam Jurnal Nor Mubin, Ery Hdayanti Sunyoto dan Rizka Fahrul Razi. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan yang digunakan oleh Bumdesma adalah menggunakan 3 kriteria laporan keuangan yang memenuhi kriteria akuntabilitas yang pertama yaitu Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Kadek Rindi, dkk, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Bumdes Teja Kusuma, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. No. 1 tahun 2017 (Sinagraja Bali : Univeraitas Pendidikan Ganesha, 2017)

Integritas keuangan merupakan kriteria laporan keuangan yang diartikan sebagai prinsip moral yang tidak memihak atau jujur, sehingga pihak dari penyusun laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi untuk membuat laporan secara jujur dan terbuka. Hal ini sesuai dengan teori dari jurnal Nur Mubin, Integritas keuangan digunakan untuk mengukur sejauh mana laporan keuangan itu disajikan secara benar dan apa adanya mulai dari kegiatan operasional, non operasional, pendapatan dan pengeluaran.

Laporan keuangan sebagai alat pertama perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak manajemen maupun pihak pengguna laporan keuangan guna menjadi pertimbangan sehat atau tidaknya suatu laporan keuangan disebuah lembaga. Di Budesma Sejahtera Mandiri sudah menyajikan laporan keuangan secara jujur dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengungkapan atau *disclousure* adalah tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Informasi penjelasan mengenai kesehatan keuangan dapat juga diberikan dalam laporan pemeriksaan.<sup>4</sup>

Menurut Scot, informasi keuangan juga didasarkan pada prinsip pengungkapan yang dinyatakan dalam *simple argument*, dan *inside information*. Hal ini disebabkan karena pihak eksternal tidak mengetahui *inside information* tapi disisi lain manajemen ingin mengungkapkan *good news*. Kejujuran manajemen sangatlah penting dan diharapkan oleh pihak eksternal untuk tidak mengungkapkan *bad information*.

Pengungkapan penuh ini bertujuan agar laporan keuangan menjadi efektif menyaratkan semua informasi disajikan dengan tidak bias, dapat dipahami dan tepat waktu. Dengan demikian pengungkapan penuh akan memenuhi kepentingan stakeholder. Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk sudah mengungkapkan informasi di pemerintahan maupun di publik dengan mengadakan acara MAD yang dihadiri oleh wakil/ utusan desa, BKAD, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, pengurus kelompok, KPMD serta pihak lain yang bersangkutan.

Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk untuk mengevaluasi dan pertanggungjawaban kelembagaan pada

---

<sup>4</sup> Ery Hidayanti, *Pentingnya Pengungkapan (Disclousure) laporan keuangan dalam meminimalisasi asimetri informasi*, Jurnal Wiga Vol. 2 (Lumajang : STIE widya Gama Lumajang, 2012)

setiap akhir periode dalam rangka perlindungan dan pelestarian dana bergulir/asset hasil kegiatan PNM di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Musyawarah ini dihadiri oleh Wakil/utusan desa, BKAD, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, Pengurus kelompok, Anggota dan pihak lain yang terkait.<sup>5</sup>

## **B. Solusi Dan Kendala yang Terjadi Dalam Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan**

Kendala merupakan rintangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap lembaga. Karena ketika suatu lembaga berjalan, maka berbagai kendala itu pasti akan datang, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Pertumbuhan Lembaga Usaha Desa di kabupaten Nganjuk menyebabkan persaingan yang tidak dapat dihindarkan. Setiap lembaga keuangan pastinya akan berlomba-lomba dalam memperbaiki laporan pertanggungjawaban untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari pemerintahan.

Hal ini sama dengan kendala penerapan prinsip akuntabilitas yang ada di Bumdesma Sejahtera mandiri kecamatan Ngetos Nganjuk adapun kendalanya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dimana tenaga kerja masih terbatas dan kurang mendalami tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan. Tenaga kerja yang sekarang ada melakukan tugasnya dengan mengikuti atau meneruskan dari laporan keuangan yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan pengelola dan anggota Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk

sudah ada. Hanya beberapa yang benar – benar memahami prosesnya secara keseluruhan.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi pemerintahan baik itu di kota ataupun di desa. Dalam menjalankan penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan ini Bumdesma Sejahtera Mandiri kekurangan tenaga dan dari tenaga yang sudah bekerja sekarang itu sendiri kurang untuk memahami prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan secara mendalam.

Solusi merupakan jalan keluar dari sebuah permasalahan yang ada yang perlu dirubah maupun diperbaiki. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi yaitu dengan cara melatih skill dari anggota serta memberikan seminar dengan tema Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pihak karyawan terhadap pekerjaannya. Pelatihan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan pelatihan tentang tehnik penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria laporan keuangan akuntabilitas, pelatihan ini ditujukan kepada tenaga kerja yang ada di Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada anggota dan pihak pengelola Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk 30 Oktober 2020

### **C. Usaha Bumdesma Mensosialisasikan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan keuangan Kepada Masyarakat**

Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk telah berusaha mensosialisasikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan dengan cara menyampaikan atau mempresentasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti masyarakat (anggota BumDesMa).

Musyawarah itu dilakukan pada setiap akhir periode dihadapan pemerintahan kemudian dihadiri oleh Wakil atau utusan desa, BKAD, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, pengurus kelompok, anggota mandiri dan pihak lain yang bersangkutan. Praktik sosialisasi tersebut tentu saja melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, karena partisipasi tersebut dibangun dari kebebasan berbicara.

Selain hal di atas, Bumdesma juga memasang papan informasi keuangan desa baik itu pendapatan maupun pengeluaran mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan di lapangan. Tujuannya adalah untuk transparansi, agar para pengunjung dapat melihat laporan pertanggungjawaban kelembagaan dengan jelas.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Untung Kridanto pada tanggal 29 Oktober 2020